

KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH DAN MOHAMMAD NATSIR

Monica Maudilian Pratiwi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Monica.mp205@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta membandingkan pemikiran politik dari dua tokoh besar Islam yang hidup di dua zaman yang berbeda, yaitu Ibnu Taimiyah (1263 - 1328) dan Mohammad Natsir (1908 – 1993). Khususnya pemikiran keduanya yang berhubungan dengan politik serta hubungan dengan agama (Islam). Dalam penelitian ini hanya di bahas tiga topik penting dari pemikiran masing – masing tokoh yaitu, pemikiran tentang ideology negara, bentuk negara, serta tentang sistem pemerintahan.

Kata Kunci: Ideologi negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Menurut Munawir Sjadzali, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan (Munawir Sjadzal, 1993 : 1-2). Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata – mata agama dalam pengertian Berat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa :

1. Islam adalah suatu negara yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru system ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti hanya halnya rasul – rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. Tetapi aliran ni juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengiraan barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran politik Islam ketiga aliran tersebut di atas telah memiliki pendukungnya masing –masing. Tetapi dalam hal ini yang penting untuk dikaji adalah bagaimana perkembangan pemikiran politik Islam tersebut sejak masa klasik sampai pada perkembangannya saat ini.

Pada masa klasik salah satu cendikawan Muslim yang cukup terkenal pada masanya, bahkan sampai saat ini adalah Ibnu Taimiyah yang lahir sekitar abad tiga belas atau tepatnya tahun

1263 dan meninggal pada tahun 1329 dalam usia 66 tahun. Pemikiran – pemikiran politik Ibnu Taimiyah mengenai hubungan antara Islam dan negara dituangkan dalam bukunya yang amat masyur “As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fii Ishlahir Raa’I war Ra’iyyah”. Sampai saat ini buku tersebut masih sering dijadikan rujukan bagi para pemikir politik Islam kontemporer. Salah satu pemikirannya yang tampak kontroversial adalah faktanya yang menyatakan bahwa enam puluh tahun dalam kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan (Ibnu Taimiyah, 1999 : 157). Dan faktanya yang kontroversial tersebut pada dasarnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi Ibnu Taimiyah pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak harus ada dalam rangka mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi apabila kesimpulan yang kita ambil hanya berhenti sampai di situ maka sesungguhnya kita telah melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam memahami pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu kita harus mengkaji secara utuh dasar pemikiran politik yang dikeluarkan Ibnu Taimiyah tersebut.

Sedangkan pada masa kontemporer ini kita mengenal pemikir politik Islam yang tidak asing lagi yaitu Muhammad Natsir. Mohammad Natsir lahir di Sumatera Barat pada tahun 1908 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1993. Selain sebagai pemikir politik Islam yang terkemuka beliau juga merupakan seorang politikus yang cukup disegani oleh kawan maupun lawan. Pemikiran Mohammad Natsir, menyatakan bahwa Islam menganut integralisme antara agama dan negara (Deliar Noer, 1996 : 284). Dalam pikirannya ideologi seorang Muslim harus selalu didasari oleh Islam. Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Mohammad Natsir juga sangat mengedepankan konsep *ijtihad*. Ketika konsep *ijtihad* dan *ijma* itu dihubungkan oleh Natsir dengan konsep syura, sampailah Natsir pada sebuah model perwujudan demokrasi. Tampaknya konsep yang terakhir ini agak

berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menekankan pada integritas pemimpin dan musyawarah.

TINJUAN PUSTAKA

Penelitian ini bersifat deskriptif dan mencoba membuka sebuah diskusi tentang wacana hubungan antara Islam dan negara. Dalam kajian ini coba ditampilkan dua tokoh sekaligus yang hidup pada dua zaman yang berbeda. Walaupun demikian masih sering kitajumpai sampai saat ini pemikiran keduanya selalu dijadikan rujukan bagi pendapat – pendapat yang berkembang. Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir merupakan dua tokoh yang berusaha ditampilkan sebagai pemikiran politik Islam terkemuka yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembaharuan pemikiran politik Islam dalam rangka mencari senesa pemikiran tentang hubungan Islam dan negara.

Buku yang cukup mendetail dalam mengkaji pemikiran politik Ibnu Taimiyah adalah :

- Teori Politik Islam disusun oleh Khalid Ibrahim Jindan.
- Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam disusun oleh Muhammad Amin.
- As-Siyar'iyah disusun oleh Ibnu Taimiyah
- Politik Kenegaraan Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah disusun oleh Jeje Abdul Rajak.

Sedangkan buku – buku yang mengkaji pemikiran - pemikiran politik Mohammad Natsir antara lain adalah :

- Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir penyumbang tulisan antara lain adalah Dr. Tarmizi Taher, Dr. Anwar Harjono, Dr. Ir. AM. Saefuddin, Dr. Ichlasul Amal, Dr. Yusril ihza Mahendra.
- M. Natsir : Dakwah ditulis oleh Tohir Luth.

Sementara itu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis melihat belum ada yang secara khusus mengangkat topik ini. Malah dari pengamatan penulis baru satu skripsi yang ada di perpustakaan pusat UMY, yaitu berjudul Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir. Selain itu penulis belum pernah menemukan kajian yang menulis tentang studi perbandingan pemikiran politik. Oleh karena itu, studi tentang komparasi dapat memperkaya topik-topik diskusi dalam kuliah ilmu politik pada umumnya dan filsafah politik Islam pada khususnya.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Sesuai dengan penjelasan Bodgan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang yang diamati (Bodgan dan Taylor, 1999:3). Sedangkan pengertian penelitian yang bersifat deskriptif ialah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatau masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*).

Berdasarkan dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitin kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Sebagaimana dikemukakan Hadawi Nawawi, penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat – tempat lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak hanya terbatas pada buku – buku, tetapi juga dapat berupa bahan – bahan dokumentasi, majalah – majalah, surat kabar, jurnal – jurnal ilmiah dan lain – lain yang berupa bahan – bahan tertulis (Hadawi Nawawi, 1983 : 30).

Karena penelitian ini mengambil obyek pemikiran politik dua orang tokoh maka penelitian kepustakaan ini, mengacu pada pendapat Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, termasuk jenis penelitian historis-faktual (Anton Barker dan Charris Zubair, 1983 : 61).

Berkenaan dengan itu dalam jenis penelitian ini akan digunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Metode Deskripsi yaitu Metode ini digunakan dengan cara menguraikan secara teratur seluruh konsepsi pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir mengenai hubungan Islam dan negara.
2. Metode Interpretasi yaitu karya – karya Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir coba diselami untuk menangkap arti dan maksud serta nuansa yang dimaksudkannya secara khas.
3. Metode Komprasi adalah Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir saling dibandingkan satu dengan pemikiran yang lainnya, sehingga dapat dimungkinkan untuk mengetahui adanya permasalahan atau perbedaan dari masing – masing tokoh (Anton Barker dan Charris Zubair, 1983 : 63-65).

PEMBAHASAN

Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir

Pertama – tama penulis menyimpulkan perbedaan dan persamaan pemikiran serta sejarah hidup antara Ibnu Taimiyah dengan Mohammad Natsir dalam table berikut ini.

Tabel 1

Antara Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir

No	Perbedaan	Persamaan
1.	<p>Dalam pemerintahan Mohammad Natsir memangku jabatan penting dalam NKRI. Bahkan beliau orang yang menolak keberadaan Republik Indonesia Serikat. Sementara beliau dituduh memelopori PRRI. Ibnu Taimiyah jabatan tertinggi beliau adalah sebagai hakim.</p>	<p>Dalam Agama baik Mohammad Natsir maupun Ibnu Taimiyah sama – sama menginginkan agama menjadi petunjuk bagi negara jadi beliau menginginkan negara agama.</p>
2.	<p>Dalam Politik Mohammad Natsir hidup pada abad ke 20. Jadi sudah mengenal perang dunia ke II beliau sudah mengenal munculnya paham komunisme dan sosialisme (paham kiri) serta paham liberalisme dan kapitalisme (paham kanan). Sedangkan di zaman Ibnu Taimiyah tidak mengenal paham komunisme, sosialisme, liberalisme dan kapitalisme.</p>	<p>Dalam negara Mohammad Natsir dan Ibnu Taimiyah sama – sama pernah masuk penjara sebagai tahanan politik dan berbeda dengan tahanan kriminal.</p>
3.	<p>Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran yang cukup kontroversial dengan mengatakan empat puluh tahun dibawah pemimpin yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin, bagi</p>	<p>Adanya pengakuan yang konsisten yang dikeluarkan melalui berbagai karya tulis Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir bahwa adanya ketegasan pernyataan mengenai</p>

	<p>orang kurang memahami pemikirannya hal ini dapat dijadikan kritik kepada Ibnu Taimiyah yang dianggap agak bersimpati dengan pemerintahan yang otoriter. Sedangkan Mohammad Natsir selalu berpendapat bahwa setiap pemimpin yang otoriter sudah secepatnya harus diganti secepat mungkin karena akan menjadi penghalang bagi sistem demokrasi dan akan memasang kebebasan rakyat.</p>	<p>adanya kesatuan antara agama dan politik. Agama dinilai sebagai sumber “ideologi tertinggi” yang mampu memberikan inspirasi kepada ideologi yang dibawahnya yaitu ideologi bernegara dimana dengan adanya ideologi tertinggi ini diharapkan adanya pijakan atau landasan moral sehingga dalam berpolitik orang akan selalu melakukan hal – hal yang positif, yang sesuai dengan tuntutan kitab suci yang dapat membawaa kemaslahatan bagi rakyat banyak.</p>
4.	<p>Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan kepala negara atau raja merupakan mandate Allah yang diserahkan kepada hamba – hambanya yang terpilih sehingga kepala negara atau raja merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi. Sedangkan Mohammad Natsir mempunyai pandangan bahwa kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial antara rakyat dan penguasa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya.</p>	<p>Adanya pengakuan dari kedua tokoh ini mengenai kurang begitu pentingnya bentuk negara, negara dapat berbentuk apa saja sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia tetapi apapun bentuk negara harus dapat memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi rakyat yang berada dibawah naungannya.</p> <p>Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Sedangkan</p>

		<p>mosi integral Natsir merupakan hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang di gagas oleh Mohammad Natsir.</p>
--	--	---

Sumber : Hasil Penelitian

PENUTUP

1. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir tentang Islam dan Negara beliau sama – sama menginginkan adanya negara agama, artinya beliau menolak keras sekularisme. Dengan demikian beliau menginginkan tokoh agama dalam hal ini Islam yang menjadi kepala negara.
2. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah hanya sedikit mempengaruhi pemikiran Mohammad Natsir karena sebagai orang yang hidup di era abad 20 beliau bersentuhan dengan sosialisme komunisme yang kekiri – kirian dan liberalisme kapitalisme yang kekanan – kanan. Itulah sebabnya beliau menentang Soekarno yang didekati komunis tetapi juga menentang imperialis kapitalis.
3. Persamaan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Mohammad Natsir adalah sama – sama menginginkan negara agama dan sama – sama menentang pemerintahan ketika beliau merasa berbeda dalam pendiriannya, mereka mempunyai karya tulis yang di dalamnya berisi ideologi tertinggi adalah ideologi agama dan sama – sama berpendapat bahwa negara dapat berbentuk apa saja sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Sedangkan perbedaannya Ibnu Taimiyah hanya menjabat sampai derajat

hakim walaupun dikenal di beberapa negara. Sedangkan Mohammad Natsir mencapai tingkat tertinggi di bawah Presiden dan Wakil Presiden yaitu jabatan Perdana Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Deliar Noer. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LPES.

Hadawi, Nawawi. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moleong, J Lexy. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Sjadzali, Munawwir. 1993. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Taimiyah, I. 1999. *Siyasah Syari'ah*. Surabaya: Risalah Gusti.